

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses atau kegiatan yang diawali dengan mencatat, menganalisis, mengolah dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi apapun yang berhubungan dengan laporan keuangan dalam suatu perusahaan.

Dewi (2018:2) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mencakup tiga aktivitas yaitu mengidentifikasi kejadian ekonomi dalam suatu perusahaan, mencatat kejadian tersebut dalam catatan akuntansi sampai menghasilkan laporan keuangan, serta mengkomunikasikan laporan keuangan kepada pihak-pihak pengguna untuk pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan terdiri atas, yaitu : pengguna internal yang berasal dari dalam perusahaan dan pengguna eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Contoh pengguna internal adalah pemilik perusahaan, pihak manajemen, bagian keuangan, bagian personalia, bagian pemasaran, dan bagian lainnya yang ada di perusahaan. Pengguna eksternal antara lain investor, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya yang berasal dari luar perusahaan.

Mulyadi (2015:1) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu proses bahkan ilmu pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya.

Surjaweni (2015:1) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 SAK

Berdasarkan IAI (2016) Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas public signifikan jika:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal ; atau
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Dhika (2011) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standard akuntansi yang ada seperti, IAS,IFRS,ETAP,GAAP. Selain itu ada juga PSAK syariah dan juga SAP.

Yuzar (2019) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah kaidah akuntansi yang boleh dipergunakan oleh usaha dengan skala kecil dan menengah atau usaha UMKM dalam pembuatan dan penyusunan akuntansinya. SAK sendiri juga mengadopsi dari aturan akuntansi yang ditetapkan IFRS, hanya saja lebih sederhana dan merujuk kepada aturan akuntansi untuk *Small Medium Enterprise* atau usaha kecil menengah. Di Indonesia sendiri aturan ini ditetapkan pada tahun 2009 dan efektif pada awal tahun 2011.

Dari pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan merupakan suatu kerangka dalam penyusunan pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian suatu laporan keuangan sehingga memudahkan pembaca laporan keuangan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda.

2.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Malini (2019) menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu kerangka prosedur petunjuk untuk pembuatan laporan

keuangan akuntansi yang berisi peraturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, perlakuan, serta penyajian laporannya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan dengan tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk bisa dibandingkan dengan laporan keuangan sebelum ataupun yang lainnya.

Annisa (2010) menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Dari pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan, serta penyajian laporan keuangan yang di susun oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yang telah disepakati serta disahkan oleh institut resmi di Indonesia.

2.1.4 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional suatu perusahaan, bernilai material, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kepada

pelanggan. Aset tetap dapat berupa Tanah, Pengembangan Tanah, Bangunan, Kendaraan, Mesin, dan Peralatan (Jin, 2018:240).

Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu. Aktiva ini digunakan dalam operasi perusahaan tidak untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Feliana, 2006:127).

Siregar (2017:271) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset yang berwujud yang :

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Berdasarkan definisi diatas terdapat beberapa hal penting terkait aset tetap, yaitu:

1. Aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik seperti (tanah, bangunan), berbeda dengan paten atau merk dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik (merupakan asset tak berwujud).
2. Aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative. Aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual, bukan merupakan aset tetap.
3. Aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar, karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Soemarsono (2017:21) menyatakan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud (*tangible fixed assets*) yang : (1) masa manfaatnya lebih dari satu tahun ; (2) digunakan dalam kegiatan perusahaan ; (3) dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta; (4) nilainya cukup besar.

Mursyidi (2019:181) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Kartikahadi, 2012:316).

Duchac (2012:2) menyatakan bahwa aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal. Standar-standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik menyatakan aset tetap yaitu aset berwujud yang:

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif.
2. Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Dari pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa aset tetap merupakan suatu kekayaan atau harta yang dimiliki suatu perusahaan yang sifatnya permanen dan aset tetap ini tidak untuk diperjualbelikan. Aset tetap tersebut dibagi menjadi

2 diantaranya aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap terwujud terdiri dari tanah, bangunan, mesin, peralatan, dll. Sedangkan aset tetap tidak berwujud aset yang tidak terlihat fisiknya yaitu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan seperti hak paten, hak cipta, merk dagang, dll.

2.1.5 Karakteristik Aset Tetap

Kieso (2007:2) menyatakan bahwa karakteristik aktiva tetap adalah sebagai berikut :

- a. Aktiva tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali.
- b. Aktiva tersebut bersiat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan.
- c. Aktiva tersebut memiliki substansi fisik.

Firdaus (2008:177) menyatakan bahwa beberapa karakteristik dari aset tetap adalah :

1. Aset tetap adalah digunakan dalam kegiatan perusahaan dan bukan untuk diperjual belikan dalam kegiatan normal perusahaan.
2. Umur atau jangka waktu pemakaiannya lebih dari satu tahun.
3. Pengeluaran untuk aset tersebut harus merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material bagi perusahaan.

Dari pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa karakteristik aset tetap yaitu mempunyai wujud fisik, bisa memberi banyak manfaat pada masa mendatang, mempunyai periode manfaat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, dan dimiliki oleh suatu perusahaan dan tidak digunakan sebagai investasi.

2.1.6 Pengakuan Aset Tetap

Sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

1. besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan
2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Ini merupakan prinsip pengakuan umum untuk aset tetap. Prinsip ini diterapkan pada saat pengakuan awal aset, pada saat bagian tertentu dari aset yang diganti, dan jika ada pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya. Jika pengeluaran tersebut menimbulkan manfaat ekonomis di masa depan, maka dapat diakui sebagai aset (Siregar, 2017:272).

Mursyidi (2009:184) menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Masa manfaat adalah; (a) periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik; atau (b) jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang

dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut.

SAK (IAI, 2017:9) menyatakan entitas harus menerapkan kriteria pengakuan dalam paragraf 2.24 dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena itu entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika:

1. Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Kriteria pengakuan aset tetap berlaku untuk pada saat pengakuan awal dan setelah pengakuan aset tetap. Menurut PSAK No. 6 Revisi (IAI, 2015:16) entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkontruksi aset tetap dan biaya selanjutnya timbul untuk menambah, mengganti bagian atau memperbaikinya. Setiap perusahaan memiliki batas biaya yang dikapitalisasi dan dibawah biaya yang dibebankan (Shok, 2013:3).

Berdasarkan PSAK No. 16 par 07 (2017:16.2) biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan
- b. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Suku cadang, peralatan siap pakai dan peralatan pemeliharaan diakui sesuai dengan pernyataan ini ketika memenuhi definisi dari aset tetap. Namun, jika tidak maka suku cadang peralatan siap pakai dan peralatan pemeliharaan diklasifikasikan sebagai persediaan (PSAK No. 16 par.08)

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan aset tetap yaitu aset tetap diakui jika mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan tidak untuk dijual, aset tetap diakui jika masa depan manfaat ekonomi dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur sehingga memenuhi kriteria dari aset tetap.

2.1.7 Biaya Perolehan

Semua biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai tiba ditempat dan siap digunakan harus dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan (*cost*) aktiva yang bersangkutan (Soemarsono, 2017:20)

Sulistiawan (2006:128) menyatakan bahwa suatu aktiva tetap berwujud akan dicatat sebesar biaya perolehannya (*historical cost*). Yang dimaksud dengan biaya perolehan meliputi setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membuat aktiva tersebut berada dalam kondisi siap digunakan. Beberapa contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung selain nilai beli aktiva tersebut adalah biaya persiapan tempat, biaya pengiriman, biaya simpan, dan bongkar muat, bea import, PPN masukan yang tidak boleh direstitusi, biaya pemasangan, dan biaya profesional.

Nilai moneter dari suatu aset tetap dapat dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu nilai moneter terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut pertama kali dan biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap, seperti: biaya perbaikan, biaya perawatan, biaya penggantian, dan biaya lainnya. Bagian ini akan membahas mengenai komponen dan pengukuran dari biaya yang dikeluarkan pada saat perolehan, yang selanjutnya akan disebut biaya perolehan (Kartikahadi, 2012:318).

Sulistiawan (2006:128) menyatakan bahwa suatu aktiva tetap berwujud akan dicatat sebesar biaya perolehannya (*historical cost*). Yang dimaksud dengan biaya perolehan meliputi setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membuat aktiva tersebut berada dalam kondisi siap digunakan.

Dari pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa biaya perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset sampai aset tersebut bisa dipakai sesuai dengan tujuannya.

2.1.8 Pengukuran Aset Tetap

Martani (2017:271) menyatakan bahwa suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi berikut ini :

1. Harga perolehannya, termasuk bea import dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.

2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut (Mursyidi, 2009:185).

SAK (IAI, 2009:68) menjelaskan pada saat pengakuan awal. Aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi:

1. Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea import dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya;
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen;
3. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi.

Dari pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pengukuran aset tetap yaitu untuk mengumpulkan seluruh biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan harga perolehan, pengukuran juga dapat dipertimbangkan jika terdapat transaksi pertukaran bukti pembelian aset dengan perusahaan lain.

2.1.9 Penyusutan Aset Tetap

Semua jenis aktiva tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berjalurnya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah pemakaian, keausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta dan keterbelakangan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aktiva tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud disebut penyusutan (*depreciation*). Penyusutan dapat dihitung tiap-tiap bulan atau ditunda sampai dengan akhir tahun. Apabila dibuat laporan keuangan interim secara bulanan, penyusutan yang dilakukan bulanan akan lebih dapat mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dalam bulan yang bersangkutan (Soemarsono, 2017:24).

Berdasarkan IAI (2009: 71-73) menjelaskan beban penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi. Entitas harus mengalokasikan jumlah aset yang dapat disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Beberapa metode penyusutan yang mungkin dipilih, antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo

menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*).

Yulianti (2014:5) menyatakan bahwa aset tetap akan disusutkan agar perusahaan dapat mengetahui bahwa nilai dari aset tetap yang tercatat tidak lagi dapat mewakili nilai manfaat yang dimiliki aset tersebut.

Diana (2017:229) menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset selama masa manfaatnya. Dalam menentukan besarnya penyusutan, perusahaan harus menentukan jumlah yang disusutkan dan periode penyusutan. Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dikurangi nilai residunya. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang diperoleh saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai akhir umur manfaatnya. Periode penyusutan ditentukan oleh umur manfaat suatu aset. Umur manfaat adalah :

- a. Periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas, atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh oleh entitas.

Berdasarkan PSAK No 16 par 43 (2017) Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan dalam pengukuran aset tetap disusutkan secara terpisah.

Kartikahadi (2012:344) menyatakan bahwa penyusutan adalah proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap sedemikian sehingga jumlah yang

dapat disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya.

Dari pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penyusutan aset tetap yaitu jumlah dari seluruh aset yang dapat disusutkan selama masa umur manfaat. Seluruh aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan nilai manfaat. Aset tetap juga akan disusutkan agar perusahaan tersebut dapat mengetahui bahawa nilai dari aset tetap yang tercatat tidak lagi dapat mewakili nilai manfaat yang dimiliki aset tersebut.

a. Metode Penyusutan

Diana (2017:230) menyatakan bahwa metode penyusutan digunakan untuk suatu aset diakaji setidaknya-tidaknya setiap akhir tahun buku atau ketika terjadi perubahan signifikan dalam signifikan dalam ekspetasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa datang aset tersebut.

1. Metode garis lurus

Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Berikut adalah rumus untuk menghitung penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Manfaat}}$$

2. Metode saldo menurun

Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Berikut adalah rumus untuk menghitung penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun:

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Nilai Tercatat}$$

3. Metode unit produksi

Metode unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan pada ekspektasi penggunaan atau keluaran dari aset. Berikut rumus untuk menghitung penyusutan dengan menggunakan metode unit produksi:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Taksiran Hasil Produksi (unit)}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu pedoman dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah referensi dan informasi untuk mengembangkan penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penerapan akuntansi aset tetap diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil
1.	Trio Mandala Putra (2013).	Analisis Penerapan	Kegiatan akuntansinya berpedoman pada Kebijakan

		Akuntansi Aset Tetap pada CV Kombos Manado.	Akuntansi yang prinsipnya mendekati Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16. Pengakuan, penghentian dan pelepasan telah sesuai dengan PSAK No 16.
2.	Fatmawaty Gino Rasyid (2016).	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No 16 Pada CV Metalindo Jaya Bintan.	Penyusutan, pengeluaran dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan SAK ETAP Bab 15. Pelepasan aset tetap belum sesuai dengan SAK ETAP Bab 15 karena perusahaan tidak mengakui adanya kerugian yang timbul dari penghentian aset tetap.
3.	Kiki Hendrika Windasari (2016).	Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No 16 Pada PT Temprina Media Grafika Jember.	PT Temprina Media Grafika berpedoman pada Kebijakan Akuntansi yang prinsipnya sudah mendekati Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16. Pengakuan dan penyusutan aset tetap telah sesuai dengan PSAK No 16.
4.	Rifrinda Maharani (2016).	Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No 16 Pada PT Pertama Mina Sutra Perkasa.	Perusahaan PT Pertama Mina Sutra Perkasa berpedoman pada Kebijakan Akuntansi yang pada prinsipnya sudah mendekati Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16. Pengakuan, pengeluaran, penghentian dan pelepasan aset tetap telah sesuai dengan PSAK No 16.
5.	Erda Yulianti (2016).	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No 16 Pada CV Metalindo Jaya Bintan.	Pengakuan aset tetap, pengeluaran setelah perolehan telah sesuai dengan PSAK No 16. Selain itu perusahaan dalam menentukan harga perolehan dari suatu aset tetap dan pencatatan atas beban penyusutan oleh perusahaan belum sesuai dengan PSAK No 16 serta penghentian dan

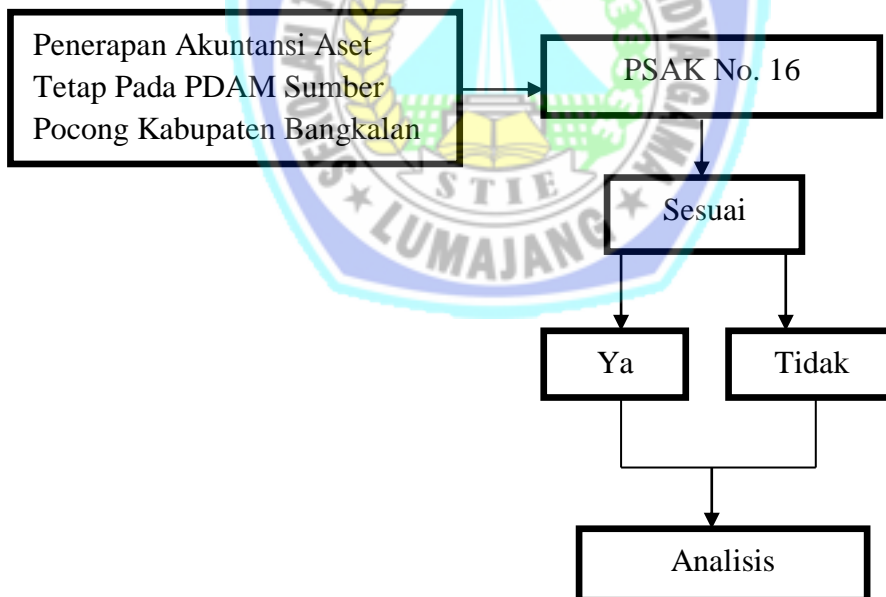
pelepasan aset tetap perusahaan juga belum sesuai dengan PSAK No 16.

Sumber : Data Diolah 2020

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto 26, Bangkalan. Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan akuntansi aset tetap pada PDAM yang diantaranya pengakuan, pengukuran, dan penyusutan yang dimana penerapan akuntansi aset tetap PDAM sesuai atau tidak sesuai dengan PSAK No 16.

Berikut gambaran kerangka berpikir :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber : Data Diolah.2020